



Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026

Provinsi Kalimantan Selatan

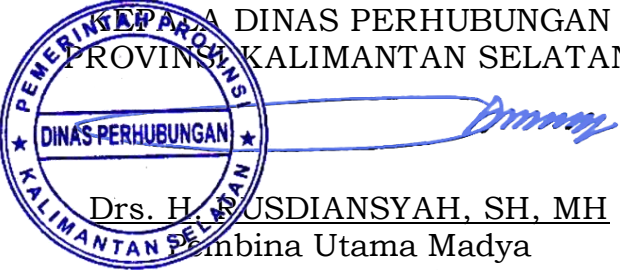
2.15.0.00.0.00.01.000

Dinas Perhubungan



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Renstra Dinas Perhubungan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu menyusun Renstra dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal dan tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good govermance and clean government*) Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.


Drs. H. MUSDIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620610 198503 1 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	13
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.....	31
2.3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	35
2.3.2 Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja.....	38
2.3.3 Kinerja Anggaran	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan	42
BAB III	47
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN.....	47

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	47
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	50
3.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota	55
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	59
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	59
3.4.2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	62
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	65
BAB IV		66
TUJUAN DAN SASARAN		66
4.1	Tujuan.....	66
4.2	Sasaran	66
BAB V		69
STRATEGI DAN KEBIJAKAN		69
5.1	Strategi.....	69
5.2	Arah Kebijakan.....	69
BAB VI		74
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		74
BAB VII		90
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		90
BAB VIII		95
PENUTUP.....		95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 diikuti dengan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Pada ayat (2) disebutkan juga Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengakselerasi tahapan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan perhubungan di daerah. Urusan perhubungan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dilaksanakan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Selanjutnya dalam pasal 273 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada ayat (4) Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah harus mampu

mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat mampu mewadahi Rencana Strategis Kementerian serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra Perangkat Daerah harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdayaguna dan berhasil gunaserta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan;
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah pembangunan urusan Perhubungan selama jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun sesuai tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang di wilayah Kabupaten/Kota, wilayah Provinsi maupun wilayah Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
2. Menyusun perencanaan pembangunan perhubungan di Provinsi Kalimantan Selatan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
3. Menyediakan instrumen pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam pasal 111 Permendagri 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan apa sajakah urusan yang dikelola oleh Perangkat Daerah dan apakah arti penting dari tiap urusan tersebut dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bila tidak

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang semua perundang-undangan yang terkait secara langsung dan mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), tugas pokok dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tujuan menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang Perhubungan dan menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Perhubungan serta menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen, yaitu :

a. Pendahuluan

b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

- c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- d. Tujuan dan sasaran
- e. Strategi dan arah kebijakan
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah.

3.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asst dan modal, dan unit usaha yang masih operasional.

3.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (sumber tabel dapat dari LAKIP PD dari lima tahun sebelumnya), menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti

MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Gambaran Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan (program) Perangkat Daerah di periode yang direncanakan. Jika pelayanan (program) Perangkat Daerah masih sama seperti periode yang lalu, maka apakah tantangan dan peluang yang harus direspon agar kinerja pelayanan (program) dapat lebih ditingkatkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan (program) Perangkat Daerah diharapkan berhasil mewujudkan kondisi ideal tertentu. Karena itu, pada bagian ini, disebutkan penyebab belum terwujudnya kondisi ideal yang dicita-citakan tersebut.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menjelaskan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. dan faktor-faktor

penghambat serta pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

3.3 Telaahan Restra KL dan Renstra Provinsi /Kabupaten/ Kota

Menjelaskan secara ringkas Renstra Perangkat Daerah dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terkait secara langsung dengan Renstra KL ataupun Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kotaserta faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra KL ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview faktlor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya,

dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Menjelaskan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya, adapun penyajian tujuan jangka menengah perangkat Daerah dilengkapi dengan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah seperti pada Tabel T-C.25

4.2 Sasaran

Menjelaskan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya, adapun penyajian tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dilengkapi dengan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah. Tabel T-C 25.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang diselenggarakan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Pada bagian ini rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan program dan kegiatan serta pendanaan kegiatan sesuai dengan RPJMD untuk mencapai Tujuan, sasaran, indikator, target yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Pada bagian ini rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja' kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, penyajiannya menggunakan Tabel 6.1. yang bersumber dari Tabel T-C.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dengan dilengkapi tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatanserta penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memasukkan urusan perhubungan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan perhubungan di daerah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian tugas pokok dan fungsi sebagai dampak penyesuaian urusan/ kewenangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya atas dasar peraturan daerah tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut

- A. Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, sedangkan fungsinya adalah :
1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan selatan dilaksanakan oleh:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
4. Kepala Bidang Angkutan Jalan
5. Kepala Bidang Pelayaran
6. Kepala UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, dengan fungsi :

1. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

5. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
7. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu Lintas Jalan, dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fungsi :

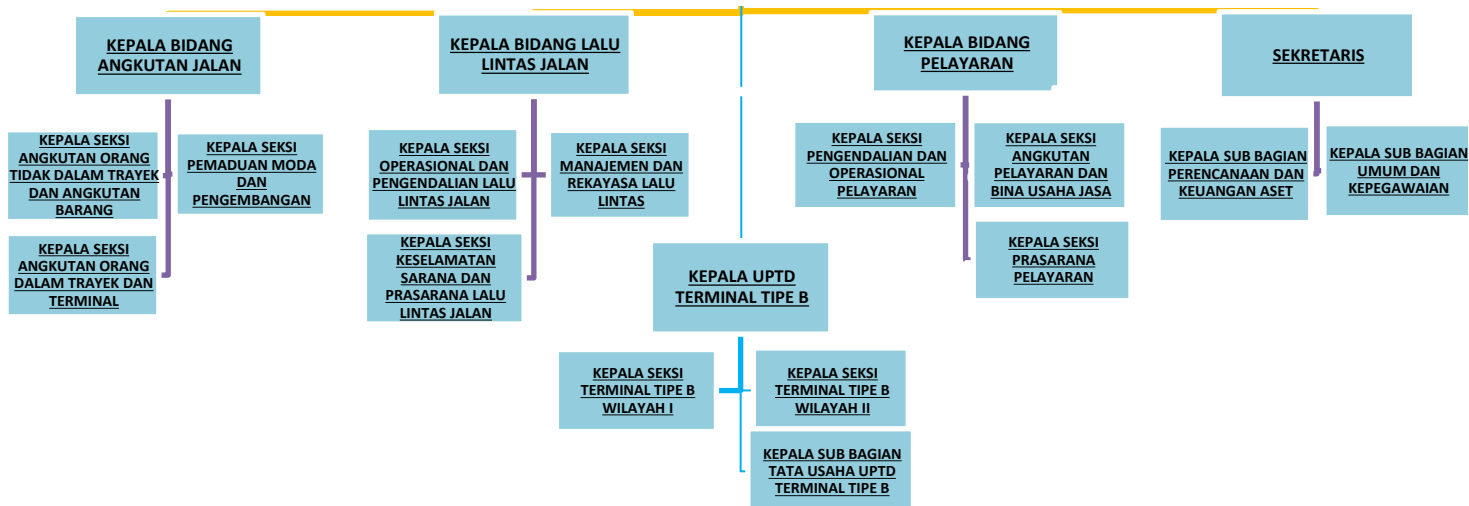
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D. Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
 3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan;
- E. Bidang Pelayaran mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, Kepelabuhanan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan;
 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.
- F. Unit Pelaksana Teknis Terminal mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas sedangkan fungsinya adalah:
1. Penyusunan rencana teknis operasional di Terminal
 2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Terminal
 3. Evaluasi dan pelaporan di Terminal
 4. Pengelolaan ketatausahaan dan

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Selatan



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

2.2.1 Kondisi Infrastruktur Perhubungan

1. Perhubungan Darat

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No 188.44/0530/KUM/2019 tentang Penetapan Terminal Tipe B di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 5 terminal yaitu terminal kilometer 6 kota Banjarmasin, Terminal Banua Lima di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terminal Mabuun di Kabupaten Tabalong, Terminal Kersik Putih di Kabupaten Tanah Bumbu, dan Terminal Stagen di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.2
Kondisi Infrastruktur Simpul Terminal Tipe B

No	Nama Terminal	Kab / Kota	Kondisi	Status Aset
1.	Km 6	Banjarmasin	Layak Oprasi	Milik Pemprov
2.	Banua Lima	Hulu Sungai Utara	Layak Oprasi	Milik Pemprov
3.	Terminal Mabuun	Tabalong	Layak Oprasi	Milik Pemprov
4.	Kersik Putih	Tanah Bumbu	Layak Oprasi	Milik Pemprov
5.	Terminal Stagen	Kotabaru	Layak Oprasi	Milik Pemprov

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Transportasi merupakan sistem pendukung yang menghubungkan berbagai fungsi ruang yang berbeda-beda di tempat yang berbeda pula. Baik fungsi ekonomi, fungsi sosial/budaya, serta fungsi lingkungan. Ketiga aspek ini juga merupakan unsur utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep transportasi yang berkelanjutan pada akhirnya memang tidak dapat terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Rasio Konektivitas dilihat dari jumlah daerah yang di layani oleh sarana transportasi. Dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0676/KUM/2014 tentang Penetapan jaringan Trayek dan Operasi Angkutan Orang di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

Tabel 2.3
Daftar Jaringan Trayek AKDP Dalam Wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2020

No.	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Plafon Bus Umum Yang Dialokasikan		Keterangan/Warna Khusus untuk Minibus Yang Tidak Berjadwal
			Berjadwal	Tidak Berjadwal	
1	2	3	4	5	6
1.	A.01	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Martapura, PP	-	250	Jingga sinar pagi polos
2.	A.02	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Pelaihari, PP	-	100	Kuning polos
3.	A.03	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Land. Ulin, PP	-	150	Atas putih bawah hijau sumatra
4.	A.04	B. Masin (P3A) – Gambut (KM.17), PP	-	125	Atas putih bawah admiralblue
5.	A.05	B. Masin (P3A) – Sei Tabuk – Gambut (KM.17), PP	-	50	Atas kuning bawah barollare
6.	A.06	Banjarmasin (KM.6) – Kalampayan, PP	-	50	Kuning polos (taksi yellow)
7.	A.07	B. Masin (Kayu Tangi) – Pulau Bakut – Porwosari – Tamban – Tabunganen, PP	-	50	Atas lacerred bawah kuning
8.	A.08	B. Masin (Trisakti) – Gambut (KM.17), PP	-	100	Biru langit les bawah hitam
9.	A.09	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Kandangan, PP	-	50	Merah 307 les bawah

No.	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Plafon Bus Umum Yang Dialokasikan		Keterangan/Warna Khusus untuk Minibus Yang Tidak Berjadwal
			Berjadwal	Tidak Berjadwal	
10.	A.10	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Barabai, PP	-	225	Hijau 940 polos
11.	A.11	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Amuntai – Alabio, PP	-	175	Merah muda metallic les bawah hitam
12.	A.12	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Amuntai – Pasar Panas, PP	50	325	Centareblue metallic polos
13.	A.13	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Barabai – Tanjung, PP	50	450	Silver metallic polos
14.	A.14	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Sungai Danau, PP	-	200	Coklat susu les bawah hitam
15.	A.15	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Sei Danau – Batulicin, PP	40	300	Atas putih bawah suzuki yellow
16.	A.16	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Serongga, PP	20	50	Atas blue metallic bawah merah
17.	A.17	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Kotabaru, PP	40	50	Putih polos les bawah hitam
18.	A.18	Rantau – Kandangan, PP	-	100	Atas putih bawah barollared
19.	A.19	Kandangan – Pantai Hambawang – Barabai, PP	30	100	Atas blue mettalic bawah merah

No.	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Plafon Bus Umum Yang Dialokasikan		Keterangan/Warna Khusus untuk Minibus Yang Tidak Berjadwal
			Berjadwal	Tidak Berjadwal	
20.	A.20	Barabai – Paringin – Tanjung, PP	-	50	Atas blue green bawah merah 06
21.	A.21	Barabai – Martapura (Cempaka) – Batulicin, PP	30	300	Hijau metallic les bawah hitam
22.	A.22	Barabai – Kandangan – Mawangi – Batulicin, PP	-	100	Atas kuning bawah hijau sumatra
23.	A.23	Amuntai – Pantai Hambawang – Barabai, PP	-	75	Atas coklat susu bawah hitam
24.	A.24	Amuntai – Paringin, PP	-	100	Atas kuning bawah barollord
25.	A.25	Amuntai – Kelua – Pasar Panas, PP	-	100	Atas putih bawah barollared
26.	A.26	Batulicin – Tarjun, PP	-	40	Hijau polos
27.	A.27	Batulicin – Serongga, PP	-	40	Atas putih bawah hijau
28.	A.28	Batulicin – Gunung Batu Besar, PP	-	40	Atas hijau bawah biru
29.	A.29	Batulicin – Sengayam PP	-	40	Atas hijau bawah putih
30.	A.30	Batulicin – Sampanahan, PP	-	40	Atas hijau bawah biru
31.	A.31	Batulicin – Geronggang, PP	-	40	Biru tua polos
32.	A.32	Batulicin – Tanjung Samalantakan, PP	-	40	Biru tua polos

No.	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Plafon Bus Umum Yang Dialokasikan		Keterangan/Warna Khusus untuk Minibus Yang Tidak Berjadwal
			Berjadwal	Tidak Berjadwal	
33.	A.33	Batulicin – Sei Durina, PP	-	40	Hijau sumatra polos
34.	A.34	Batulicin – Tanjung Batu, PP	-	40	Putih polos
35.	A.35	Batulicin – Hampang, PP	-	40	Biru laut polos
		JUMLAH	260	4.025	

Sumber data: Bidang Angkutan Jalan Dishub Prov Kalsel , 2020

a. Perencanaan Simpul Lalulintas Angkutan Orang

Simpul lalu lintas merupakan unsur pendukung kinerja jaringan baik itu pertemuan antara arus dan pada jaringan dan atau konektivitas antar jaringan sebagaimana hasil analisa maka rencana peningkatan kinerja simpul lalu lintas yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan fasilitas prasarana terminal penumpang angkutan umum tipe B pada tiap kabupaten/kota sebagai simpul konektivitas layanan angkutan umum AKDP;
- 2) Melakukan optimalisasi pelayanan angkutan umum sehingga meningkatkan pemilihan moda simpul split bagi pergerakan orang dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum;
- 3) Pembentukan wilayah wilayah aglomerasi untuk penataan angkutan antar kota dalam suatu

kawasan sebagai layanan pendukung jalur utama AKDP;

- 4) Merencanakan simpul-simpul yang terintegrasi dengan moda lain.

Tabel 2.4
Data Penumpang AKDP Terminal Tipe B 2019 - 2020

No.	Tahun	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)							
		Penumpang				Angkutan Umum			
		Datang (Orang)		Berangkat (Orang)		Datang (Buah)		Berangkat (Buah)	
		Mini Bus	Bus	Mini Bus	Bus	Mini Bus	Bus	Mini Bus	Bus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terminal Kersik Putih Batulicin								
1	2019	17,450	-	8,904	-	2,804	-	1,060	-
2	2020	6,384		2,489		1,760		486	
	Terminal Stagen								
1	2019	5,634	-	4,313	-	358	-	356	-
2	2020	754	-	778	-	80	-	89	
	Terminal Banua Lima Amuntai								
1	2019	11,642	-	39,285	-	682	-	2,772	-
2	2020	3,982	-	-	-	788	-	-	-
	Terminal Mambuun Tanjung								
1	2019	2,411	-	2,283	-	1,116	-	829	-
2	2020	2,434	-	2,479	-	767	-	791	-
	Terminal Km 6 Banjarmasin								
1	2019	28,840	10,498	29,546	17,440	11,172	1,306	10,471	1,113
2	2020	26,857	-	49,138	-	3,791	-	4,837	-
	JUMLAH	106,388	10,498	139,215	17,440	23,318	1,306	21,691	1,113

Sumber: Bidang Angkutan jalan Dishub Prov Kalsel tahun 2020

b. Perencanaan Jaringan Lalulintas angkutan Barang

Perencanaan jaringan lalu lintas angkutan barang perencanaan peningkatan kinerja jaringan angkutan barang lebih menitik beratkan pada usaha penyediaan jalur lintas utama bagi pergerakan angkutan barang melalui ruas-ruas tertentu sebagai berikut:

- 1) Perubahan lintasan angkutan barang rute Banjarmasin menuju Kalimantan Tengah yang

semula melewati jalur dalam Kota Banjarmasin diubah menjadi dua rute pada rute pertama dari Pelabuhan Trisakti melewati Jalan Gubernur Subarjo Lingkar Selatan menuju Kalimantan Tengah melalui Jalan Gubernur Syarkawi lingkar Utara pada rute kedua distribusi distribusi barang melalui jalur bir dan bor dan terkoneksi dengan Jalan Lingkar Dalam Gatot Subroto Trisakti

- 2) Usulan rencana lintasan angkutan barang dari wilayah Banjarbaru Lama menuju Banua 6 yaitu dari Simpang liangganggang melewati ruas Jalan Trikora kemudian melalui jalur lingkar timur Banjarbaru dan selanjutnya melalui Jalan tembus Mataraman Sungai Ulin rute ini Mengalihkan arus angkutan barang dari dalam Kota Banjarbaru dan CBD Martapura
- 3) Optimalisasi jalur lingkar pada tiap-tiap Kabupaten yaitu pada jalur lingkar Rantau - jalur lingkar barat dan jalur lingkar kersik putih Batulicin

c. Pelayanan Angkutan Aglomerasi

Pelayanan transportasi yang dikelola oleh dinas perhubungan yaitu Bus Rapid Transit (BRT) dimana Perencanaan Angkutan Masal BRT BanjarBakula Dikembangkan sistem layanan yang selanjutnya pemerintah perlu mendorong beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum penataan trayek angkutan umum dan pengembangan angkutan *feeder* ke pusat-pusat bangkitan dan tarikan perjalanan; pembatasan angkutan pribadi hingga pemberian subsidi angkutan murah oleh pemerintah

Tabel 2.5
Data Koridor dan Sarana Prasarana Bus rapid Transit (BRT)

Koridor	Klasifikasi dan koridor pengembangan	panjang koridor (km)	Sarana-Prasarana			Sistem Operasi	
			jumlah sarana	jenis sarana	jumlah halte	headway	trip/rit
1	Banjarmasin Tengah (Gubernuran) - Terminal Induk KM. 17 - Banjarbaru	39,7	52	bus besar	51	7	6/3
2	Terminal Induk KM. 17 - Terminal Liang Anggang - Martapura	35,3	32	bus besar	24	10	6/3
3	Terminal Handil Bakti - Banjarmasin Utara - Terminal Induk KM. 17	22,9	38	bus besar	28	7	8/4
4	Banjarmasin Barat (Pelabuhan Trisakti) - Terminal Induk KM. 17	20,7	29	bus besar	11	7	10/5
5	Terminal Induk KM. 17 - Terminal Liang Anggang - Pelaihari	55,6	20	bus besar	11	15	6/3
6	Terminal Handil Bakti - Sei Gampa - Marabahan	42,1	19	bus sedang	8	15	8/4

Sumber: Bidang angkutan jalan Dishub Prov Kalsel, 2020

Tabel 2.6
Daftar Jaringan Trayek Angkutan Massal BRT Banjarbakula

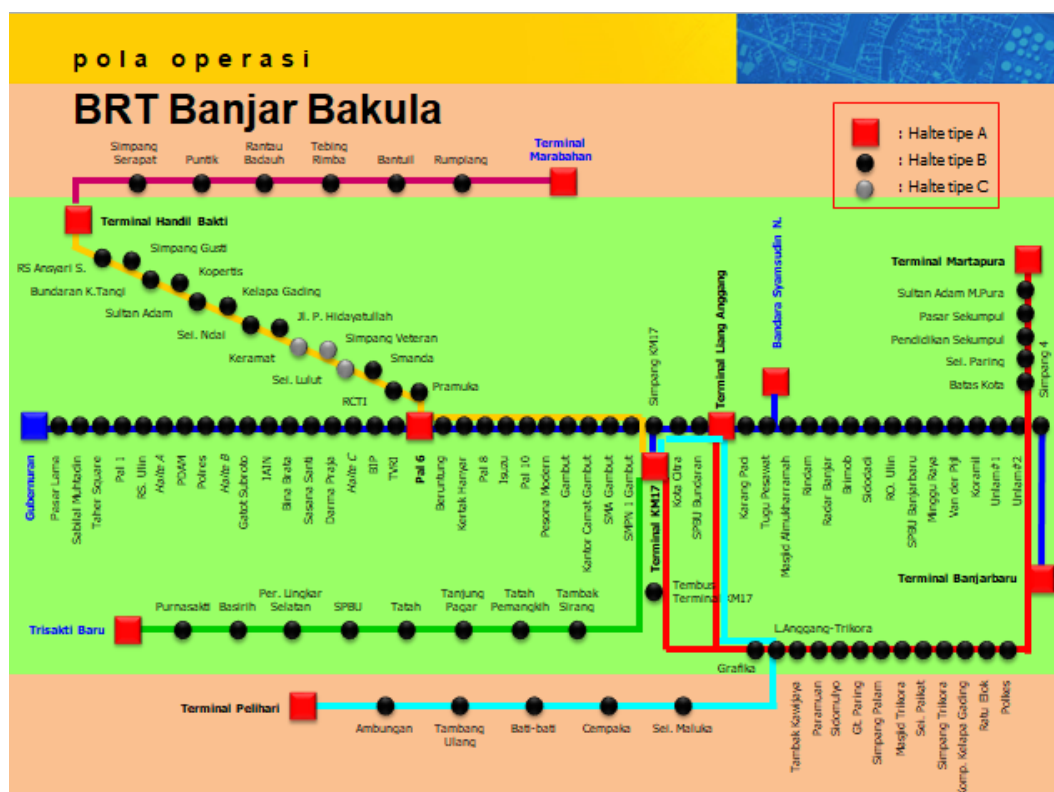
No	Koridor pelayanan	Lintas pelayanan
1	Koridor I	Km 0 Banjarmasin-lambung Mangkurat- Jal A yani- Term Km 6 Banjarmasin-Term km 17 Gambut Barakat (pulang Pergi)
2	Koridor II	Km 17 Gambut Barakat-Jalan A yani - Term Banjarbaru (Pulang Pergi)
3	Koridor III	Terminal Km 17 - Jl. Tembus Km 17 - Liang Anggang - Jl. Trikora - Jl. Mistar Cokrokusumo - Terminal C Banjarbaru - Terminal Martapura (Pulang Pergi)
4	Koridor IV	Terminal Handil Bakti - Jl. Brigjen. Hasan Basri - Jl. Sultan Adam - Jl. P. Hidayatullah - Jl. Veteran - Jl. Pramuka - Jl. A. Yani - Terminal Km 17 (Pulang Pergi)
5	Koridor V	Terminal KM 17 Gambut Barakat-Liang Anggang- Jl Gubernur Subarjo-Pelabuhan Trisakti (Pulang Pergi)
6	Koridor VI	Handil Bakti-Jl Trans Kalimantan -Jl Banjarmasin-Marabahan) Terminal Marabahan (pulang Pergi)

No	Koridor pelayanan	Lintas pelayanan
7	Koridor VII	Terminal KM. 17 - Terminal Liang Anggang - Bentok (Pulang-Pergi)
8	Koridor VIII	Bentok- Bati-bati - Terminal Pelaihari (Pulang-Pergi)
9	Koridor IX	Terminal Km 17 Gambut Barakat-Bandara Syamsudin Noor (Pulang Pergi)
10	Koridor X	Terminal Km 6 Banjarmasin-Pramuka-Jl Martapura Lama Sungai Tabuk (Pulang Pergi)

Sumber: Bidang angkutan jalan Dishub Prov Kalsel, 2021

Gambar 2.1

Jaringan Angkutan Feeder/ Pengumpan Angkutan Massal Bus Rapid Transit (BRT) yang Meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar



d. Simpul Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

Pemanfaatan potensi Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengembangan wilayah. Transportasi sungai, danau dan penyeberangan pernah menjadi moda angkutan utama di Provinsi Kalimantan Selatan, baik untuk mobilitas orang dan barang antar Kecamatan maupun antar Kabupaten/Kota. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan selatan melakukan pengawasan terhadap dermaga penyeberangan antar kota dalam provinsi sebagai table berikut:

Tabel 2.7
Data Produksi Penumpang Angkutan dan Penyeberangan
Tahun 2018 s.d 2020

No.	Dermaga	Jumlah Kapal	PENUMPANG					
			2018		2019		2020	
			Naik	Turun	Naik	Turun	Naik	Turun
1	Dermaga penyeberangan Batulicin	7	516.598	486.708	541.598	504.400	453.566	401.197
3	Dermaga Penyeberangan Alalak	6	243.970	222.392	256.277	238.467	220.662	195.371
4	Dermaga Sungai dan Penyeberangan Banjar Raya	6	215.957	214.493	250.980	249.950	179.393	178.815
5	Dermaga Sungai Pasar Baru	5	8.116	6.919	6.634	5.226	6.120	5.260
6	Dermaga Sungai Pasar Lima	8	36.512	29.997	17.890	10.837	13.322	6.975
7	Dermaga Ujung Murung	3	8.043	4.510	6.415	3.458	4.696	2.547
TOTAL			1.029.196	965.019	1.079.794	1.012.338	877.759	790.165

sumber: Bidang pelayaran Dishub Kalsel, 2020

2. Perhubungan Laut

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi laut merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

- a. Untuk meningkatkan akses antara pusat pelayanan yang satu dengan lainnya
- b. Mengefektifkan terbentuknya struktur tata ruang wilayah
- c. Mengoptimalkan jangkauan pelayanan pusat mengembangkan provinsi terhadap wilayah pelayanannya
- d. Menjangkau dan membuka kawasan potensial untuk mengembangkan budidaya yang selama ini terisolir
- e. Meningkatkan interaksi dan sirkulasi masyarakat dari kegiatan perekonomian

Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan bongkar muat barang naik turun penumpang dan keluar masuk kapal dalam dan luar negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dilayani oleh 4 penyelenggara pelabuhan yang terdiri atas:

- a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas 1 Banjarmasin
- b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas III Kotabaru
- c. Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas 3 Kintap
- d. Kantor unit penyelenggara Pelabuhan UPP kelas 3 Satui

Untuk melihat kebutuhan bongkar muat dapat Lebih detail terkait *Load Factor* LF atau tingkat keterisian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Data Jumlah Penumpang dan Barang Angkutan Laut
Tahun 2020

RUAS TRAYEK	PENUMPANG		BARANG		LOAD FACTOR (%)
	TURUN (org)	NAIK (org)	BONGKAR (Ton)	MUAT (Ton)	
Batulicin - Kotabaru	3.254	3.254	254	254	11,24
Batulicin - Marabatuan	5.084	5.084	329	329	17,56
Marabatuan - Maradapan	544	544	18	18	1,88
Maradapan - Matasiri	864	864	25	25	2,99
Kotabaru - Majene	12.050	12.050	5.238	5.238	41,63
TOTAL	21.962	21.962	5.866	5.866	15,06

Sumber: Bidang Pelayaran Dishub Prov Kalsel 2020

Pemanfaatan jasa angkutan laut perintis di Provinsi Kalimantan Selatan (Trayek R-12) meningkat pesat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Ini dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 2.9
Data Jumlah Penumpang dan Barang Angkutan
Tahun 2016 s.d 2020

TAHUN	PENUMPANG		BARANG	
	TURUN (org)	NAIK (org)	BONGKAR (Ton)	MUAT (Ton)
2020	21.796	21.796	5.864	5.864
2019	26.449	26.449	4.600	4.600
2018	37.243	37.243	1.008	1.008
2017	37.649	37.649	484	484
2016	27.529	27.529	387	387

Sumber: Bidang Pelayaran Dishub Prov Kalsel 2020

1. Saat ini, selain Trayek R-12, masyarakat Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu juga dilayani angkutan laut perintis Trayek R-17 yang berpangkal di Pelabuhan Surabaya.
2. Pada penyelenggaraan tahun 2020, *Load Factor* (LF) rata – rata seluruh ruas trayek adalah 15,06 %, sedangkan LF terbesar berada pada ruas trayek Kotabaru - Majene yaitu 41,63 %. Ruas trayek lain yang berada diatas rata – rata adalah ruas trayek Batulicin – Marabatuan dengan LF sebesar 17,56 %. Terjadi peningkatan jumlah barang yang diangkut sebesar 27,48 % dari tahun sebelumnya, namun demikian jumlah penumpang terjadi penurunan sebesar -17,59 % diakibatkan pandemi Covid-19.
3. Penggunaan sistem jaringan pada pelabuhan singgah di Kecamatan Pulau Sembilan (Pulau Marabatuan, Maradapan dan Matasirih) pada tahun 2020 merupakan pilihan satu-satunya, namun demikian pembangunan Pelabuhan Marabatuan dan Matasiri telah selesai dan diujicoba pada Bulan Agustus 2020. Pada tahun 2021 bongkar muat serta turun naik penumpang sudah bisa dilakukan di pelabuhan–pelabuhan tersebut. Untuk Pulau Maradapan penggunaan sistem rede tetap dilakukan dan diharapkan kedepannya Pemerintah (Kementerian Perhubungan) dapat membangun pelabuhan di Pulau tersebut.
4. Pengadaan jasa angkutan laut perintis untuk trayek R-12 masih sangat diperlukan masyarakat Kabupaten Kotabaru khususnya Kecamatan Pulau Sembilan dan Kabupaten Tanah Bumbu untuk memasarkan hasil pertanian, perkebunan dan sumber daya laut serta memenuhi kebutuhan hidup yang hanya bisa diperoleh dari daerah yang sudah maju yaitu Batulicin dan

Kotabaru. Selain itu, angkutan laut perintis sangat diperlukan sebagai sarana mobilisasi penduduk guna keperluan pendidikan dan juga untuk waktu tertentu diperlukan pemerintah dan elemen masyarakat lain guna keperluan distribusi logistic bencana, pemilu dan penelitian.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan saat ini terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 78 dan Pegawai Non PNS sebanyak 146 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Kerja	Go IV	Gol III	Gol II	Gol I	Pegawai Non PNS	Jumlah
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1 Orang
Sekretaris	1	11	3	1	-	16 Orang
Bidang Pelayaran	2	9	1	-	20	32 Orang
Bidang Lalu Lintas Jalan	2	9	6	-	17	34 Orang
Bidang Lalu Lintas Angkutan	-	8	1	-	60	69 Orang
UPTD Terminal Tipe B		9	14	1	48	72 Orang
Sub Total						224 Orang

Sumber: Sekretariat Dinas Perhubungan Prov Kalsel

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang masuk kedalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 telah mengalami perubahan, yang pertama adalah kinerja yang

ditetapkan saat Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan, kemudian terjadi perubahan indikator pada tahun 2021 karena terjadi perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah disajikan pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2016 -2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Moda Transportasi Angkutan Umum Terhadap Frekuensi Perjalanan	poin		0.65	0.67	0.68	0.7		0.48	0.52	0.54	0.68				73.85%	77.61%	79.41%	97.14%	
2	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang terpasang Fasilitas Keselamatan Jalan	%		16.8	18.6	20.4	25.7		16.8	18.6	20.4	23.8				100.00%	100.00%	100.00%	92.73%	
3	Persentase Panjang Alur Pelayaran Sungai yang memenuhi standard	%		57	58	60	62		42	44	45	60				73.68%	75.86%	75.00%	96.77 %	

4	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Transportasi	poin		N/A	N/A	N/A	N/A	81.25	-	78	79.5	80	77.5		0.00%	120.00 %	118.69%	115.94 %	95.07 %
5	Rasio konektivitas provinsi	poin						0,5987					0,5987						100%
6	On time performance layanan transportasi (Darat dan Air)	poin						0,166					0,166						100%
7	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dengan kematian per 100.000 keberangkatan	poin						0 (Zero)					0						100%

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

2.3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam renstra Dinas Perhubungan 2016-2021 telah disusun indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini hasil capaian kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

a. Rasio Moda Transportasi Angkutan Umum

Terhadap Frekuensi Perjalanan Penggunaan transportasi pribadi di Provinsi Kalimantan Selatan perlu dikurangi untuk mengatasi masalah kecelakaan dan kemacetan, salah satunya dengan menggunakan transportasi umum dalam melakukan perjalanan. Ada dua jenis transportasi umum di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu transportasi umum konvensional dan transportasi umum online. Pemilihan transportasi umum dapat dipengaruhi oleh beberapa kriteria, yaitu kriteria aman, nyaman, biaya, waktu, dan kemudahan. Hasil survei dan hasil pengolahan data menggunakan metode Analytical Hierarchy Process menunjukkan bahwa kriteria aman menjadi prioritas masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan bobot sebesar 27,5%, kemudian kriteria nyaman (20%), kriteria waktu (18,7%), kriteria kemudahan (17%), dan kriteria biaya (16,8%). Berdasarkan kriteria yang ditentukan, transportasi umum online menjadi prioritas masyarakat dalam memilih moda transportasi umum dengan bobot sebesar 58,80% dan transportasi umum konvensional (41,20%). Dari penelitian ini juga mendapatkan hasil

analisis sensitivitas terhadap pemilihan moda transportasi umum. Hasil analisis sensitivitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transportasi umum online masih menjadi prioritas dalam pemilihan moda transportasi umum di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Martapura.

Masing masing realisasi indikator kinerja yaitu Rasio Moda Transportasi Angkutan Umum Terhadap Frekuensi Perjalanan pada tahun 2020 sebanyak 75% dengan target yang ditetapkan yaitu 73% sehingga persentase capaian sebesar 102,74%.

b. Persentase Ruas Jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan jalan

Ruas jalan provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan jalan berdampak pada pengurangan angka kecelakaan di ruas jalan tersebut. Terdapat 15 segmen jalan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 15 segmen tersebut sudah terpasang 3 segmen pada tahun 2020. Pada Indikator Kinerja yaitu Persentase Ruas Jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan jalan pada tahun 2020 sebanyak 32,85% dengan target yang ditetapkan yaitu 32,85% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

c. Persentase Panjang Alur Pelayaran Sungai yang memenuhi standard

Terdapat 4 alur sungai di Kalimantan Selatan, ditahun 2020 peningkatan panjang alur sungai yang bisa dilayari dan dibersihkan dari sampah sebanyak 4 buah alur sungai yang secara keseluruhan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja pada tahun ini masih belum bisa memenuhi target jangka menengah,

Pada Indikator Kinerja yaitu Persentase Panjang Alur Pelayanan Sungai yang memenuhi standard pada tahun 2020 sebanyak 65% dengan target yang ditetapkan yaitu 63% sehingga persentase capaian sebesar 103.17%.

d. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Terminal Tipe B

Persentase Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Terminal Tipe B, Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan sesuai dengan SOP Terminal Tipe B terealisasi sebesar 109.86% dari target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2021 terdapat perubahan indikator kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan karena terjadi perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai berikut

a. Rasio Konektivitas Provinsi

Masing masing realisasi indikator kinerja yaitu Rasio Rasio Konektivitas provinsi pada tahun 2021 sebesar 0.5987 dengan target yang ditetapkan yaitu 0.5987 sehingga persentase capaian sebesar 100%.

b. On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air)

Pada Indikator Kinerja yaitu On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air) pada tahun 2021 sebanyak 0.166 dengan target yang ditetapkan yaitu 0.166 sehingga persentase capaian sebesar 100%.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Pada Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2021 sebanyak 77,5 dengan target yang ditetapkan yaitu 81,15 sehingga persentase capaian sebesar 95,5%.

- d. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan

Pada indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan Pada Tahun 2021 Sebesar 0 Dengan Target Yang Ditetapkan yaitu 0 Sehingga persentase capaian sebesar 100%

2.3.2 Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Tahun 2021 dinas perhubungan melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi mengalami penurunan 3,65%, dengan capaian 77,5 % dengan target 81,25%. Penurunan ini terjadi dimasa pandemi covid -19 pelayanan publik yang diselenggarakan dinas perhubungan mengalami hambatan dikarenakan terbatasnya jumlah penumpang yang bisa dilayani dan adanya rasionalisasi anggaran tahun 2021 yang terjadi.

2. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan

Capaian indikator kinerja tersebut tercapai 100%, hal ini dikarenakan dukungan program dan kegiatan yang memenuhi sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, pengawasan angkutan yang sesuai peruntukan dan izinnya Untuk Mewujudkan keselamatan pengguna transportasi salah satunya didukung oleh perlengkapan keselamatan jalan yang terpasang dan terpelihara. Pemasangan perlengkapan keselamatan jalan di ruas jalan provinsi terdiri dari pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) *smart system*, traffic light pada persimpangan jalan yang

rawan kecelakaan, pemasangan rambu jalan dan pengecatan rambu jalan. Selain di pasang, perlengkapan keselamatan jalan juga dilakukan secara berkala untuk menjaga fungsi dari perlengkapan keselamatan jalan tersebut

2.3.3 Kinerja Anggaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan, pada tabel di bawah disajikan kinerja anggaran mulai tahun 2016 sampai dengan 2021.

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Kalsel Tahun 2016-2021

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tahun 2017-2020:																		
Belanja Tidak Langsung																		
Belanja Langsung:																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.209	2.007	2.475	2.943	2.983		2.142,12	1.965,163	2.076,95	2.684,14	2.865,99		96.97 %	97.91 %	83.88 %	91.20 %	96.04 %	
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	919	870	764	1.209	2.133		817,115	854,561	736,24	832.156	923.358		88.90 %	98.16 %	96.34 %	68.82 %	43.27 %	
Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75	75	78	200	200		73,146	72,561	68,53	71.52	189,25		97.33 %	96%	87.18 %	35.50 %	94.50 %	
Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Sarana Perhubungan	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000		14.894	14.6524,986	14.621,16	18.965,14	8.100,132		99.29 %	97.%	97.47 %	94.83 %	32.40 %	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan Pelayanan Dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	4.684	4.760	5.402	8.750	10.000		4.576,18	4.696,35	5.367,12	7.986,54	3.525,463		97.69 %	98.66 %	99.35 %	91.27 %	35.25 %	
Tahun 2021:																		
Belanja																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						15.779,700						14.756.803						94,09 %
Program Penyelenggaraan LLAJ						8.371,922						7.767.345						70,11 %
Program Pelayanan						3.549,577						3.698.800						97,04 %

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan

Berbagai kondisi Internal dan Eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan meliputi :

1. Strengths (kekuatan) Internal
 - a) Adanya payung hukum yang kuat dan SDM yang potensial pada penyelenggaraan Perhubungan serta koordinasi antar instansi, Pemerintah Pusat dan kabupaten / kota yang baik
 - b) Beroperasinya layanan angkutan umum aglomerasi Dan Terdapat simpul transportasi dalam satu kawasan di wilayah Banjarbakula
2. Weaknesses (kelemahan) Internal
 - a) Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana keselamatan transportasi.
3. Oportunities (peluang) Eksternal
 - a) Adanya aglomerasi pengembangan kawasan strategis wilayah dan ditetapkannya KSP di Kalimantan Selatan
 - b) Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi
 - c) Adanya layanan transportasi masal perkotaan yang dapat digunakan sebagai feeder dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

4. Threats (tantangan) External

- a) Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor
- b) Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi

Proses identifikasi pada hasil analisa SWOT (tabulasi antara Faktor Eksternal: peluang dan ancaman dengan Faktor Internal: kekuatan dan kelemahan) diharapkan strategi yang dikembangkan akan menuju pada pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil akhir identifikasi isu strategis yang disusun secara berurutan didasarkan pada urutan prioritas, agar memudahkan proses perumusan strategi. Berikut ini merupakan bagan analisis SWOT

Tabel 2.13
Analisa SWOT

INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
<i>EXTERNAL</i>	1. Adanya payung hukum yang kuat dan SDM yang potensial pada penyelenggaraan perhubungan serta koordinasi antar instansi, Pemerintah Pusat dan kabupaten / kota yang baik 2. Beroperasinya layanan angkutan umum BRT Banjarbakula	Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana keselamatan transportasi

PELUANG	S-O	W-O
1. Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau 2. Adanya layanan transportasi masal perkotaan yang dapat digunakan sebagai feeder.	1. Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebarkan dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien. 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis sustainable transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata	

ANCAMAN	S-T	W-T
1. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor 2. Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi	Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal)	Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

5. Strategi Strengths - Oportunities

- a) Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebarkan dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien.
- b) Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis sustainable transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata

6. Strategi Strengths – Threats

- a) Pengembangan sistem angkutan umum masal (SAUM) yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;

7. Strategi Weaknesses – Threats

- a) Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Perlunya pemantapan system transportasi dan konektivitas antar kawasan pengembangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah	Tingginya kemacetan di jalan	1. Belum optimalnya sistem manajemen lalu lintas untuk mengurangi kepadatan lalu lintas 2. Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi masal perkotaan berbasis jalan serta integrasi antar moda angkutan 3. Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian 4. Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah 5. Belum optimalnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pengawasan dan pengendalian transportasi 6. Belum optimalnya pelaksanaan andalalin 7. Belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas 8. Belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan
		Belum optimalnya perizinan dan pelayanan angkutan umum yang menghubungkan bandara, pelabuhan, terminal dan stasiun pada pusat kegiatan strategis	1. Belum optimalnya pelayanan Angkutan Umum Aglomerasi dan Perbatasan (masih adanya perbatasan yang belum terlayani Angkutan Umum, rendahnya pengembangan Angkutan Massal, kurangnya jumlah Trayek Angkutan Umum perintis) 2. Belum optimalnya pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Belum optimalnya integrasi Angkutan lanjutan dan Kawasan, Tingginya pelanggaran ijin Angkutan sewa dan sewa khusus, tidak terkendalinya pertumbuhan Angkutan sewa khusus)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pelayanan Terminal Tipe B	1. Banyaknya pengemudi angkutan umum yang cenderung naik/menurunkan di luar terminal 2. Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah 3. Rendahnya kondisi insfrastruktur terminal tipe B di Kalimantan Selatan 4. Kurangnya SDM berlatar belakang teknis pengelolaan terminal
		Belum optimalnya kinerja transportasi Perairan	1. Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan ASDP 2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengembangan wilayah 3. Belum optimalnya sosialisasi / bimbingan keselamatan kepada para operator angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan Perairan 4. Belum optimalnya kelancaran alur pelayaran sungai danau dan penyeberangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum Tersedianya Angkutan Perkeretaapian	1. Tingginya nilai investasi infrastruktur, sarana dan operasional angkutan kereta api sehingga menyebabkan pihak swasta dan pemerintah belum mampu untuk merealisasikan rencana pembangunan perkeretaapian di Kalimantan.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kalimantan Selatan, maka Visi Tahun 2021-2026 yaitu:

“ KALSEL MAJU “

***Kalimantan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan
Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara***

Makna yang terkandung dalam visi Kalimantan Selatan 2021 - 2026 dijabarkan sebagai berikut :

Makmur Sejahtera ; Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman, Dan Sentosa

Berkelanjutan ; Pembangunan Dengan
Memperhatikan Keseimbangan
Antara Sosial, Ekonomi, Dan
Lingkungan

Gerbang Ibukota Negara ; Kaltim Telah Ditetapkan Sebagai
Ibu Kota Negara Yang Baru. Kalsel
Dari Letaknya Yang Strategis
Menjadi Gerbang Ibukota Negara
(IKN) Baru

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah,
maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, yaitu

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berbudi Pekerti Luhur
Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan, Pendidikan dan
Sosial Budaya, Kesehatan, Keterampilan, Kepemudaan
dan Olah Raga
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
Meningkatkan Ekonomi melalui Transformasi Struktur
Ekonomi dari Komoditas Bahan Mentah Industri
Turunannya (Hilirisasi)
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
Membangun Sarana Prasarana Pembangunan Pelayanan
Dasar dan Ekonomi berbasis Kewilayahan
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada
Pelayanan Publik
Melanjutkan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik
untuk mendorong Investasi
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat
Ketahanan Bencana

Pengendalian Banjir, Pencemaran, Perusakan Lingkungan, dan Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis Teknologi

“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”. Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana halnya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Dari 5 (lima) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut, urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan secara langsung mendukung **Misi Ke Tiga “Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian Membangun Sarana Prasarana Pembangunan Pelayanan Dasar dan Ekonomi berbasis Kewilayahan”**

Permasalahan yang terjadi beserta faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah terhadap pencapaian Misi Kepala Daerah, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	MISI 3: Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian Membangun Sarana Prasarana Pembangunan Pelayanan Dasar dan Ekonomi berbasis Kewilayahan	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan pengembangan lalu lintas angkutan jalan, pemanduan moda transportasi, dan pengelolaan terminal	Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel serta integrasi antar moda angkutan	Penghambat: Belum Optimalnya kebijakan pemerintah dalam mendukung mobilisasi masyarakat pengguna sarana transportasi
			Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Penghambat: Kurang optimal nya keterjangkauan wilayah yang dapat di akses oleh sarana transportasi masal yang tersedia
			Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah	Pendorong: Mengintegrasikan keterpaduan moda antar koridor pelayanan transportasi antara pemerintah pusat dan daerah
				Penghambat: 1. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih rendah dan terbatas. 2. Masyarakat di Kalimantan selatan masih terbiasa menggunakan sarana transportasi pribadi
				Pendorong: Pemerintah provinsi kaliamantan selatan telah

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				menyediakan sarana transportasi masal dan menyediakan trayek-trayek yang untuk mendukung kegiatan mobilitas masyarakat
			Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan	Penghambat: Tidak seimbang pertumbuhan dan perkembangan Jalan dengan Fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang
				Pendorong: Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk mendukung ketersediaan jumlah fasilitas perlengkapan jalan
			Masih tingginya overloading angkutan barang	Penghambat: Kurang patuhnya pengemudi angkutan barang untuk mengikuti peraturan terkait batas berat dan dimensi angkutan barang
				Pendorong: Adanya peraturan Menteri Perhubungan No 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
		Terwujudnya pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional dan angkutan Pelayaran	Belum tersedianya pelabuhan regional	Penghambat Kesulitan untuk menemukan lokasi ideal untuk pelabuhan skala internasional yang sanggup mengakomodasi kapal dengan draft di atas 15 m dan juga besarnya biaya untuk membangun pelabuhan pelabuhn baru
				Pendorong: Adanya program strategis pemerintah di Provinsi Kalimantan selatan berupa pengembangan kawasan industry Batulicin dan kawasan industry jorong serta program strategis provinsi berupa kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, juga danya program pembangunan Ibukota negara IKN di Penajam Paser Utara yang

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				letaknya relative dekat dengan kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tabalong.

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020-2024 memuat kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan. Renstra memuat tujuan dan sasaran strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian Perhubungan serta mendukung pencapaian target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Perhubungan disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.3**Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan**

No	Misi Kementerian Perhubungan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasional	Rasio konektivitas nasional
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	• <i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi • Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya keselamatan transportasi Meningkatnya Kualitas SDM transportasi yang kompeten	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten

No	Misi Kementerian Perhubungan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
	pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan Produktif.				
4	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori “Sangat Baik”	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian Indeks RB Kementerian Perhubungan
5	Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi	Tingkat penggunaan Teknologi Transportasi yang ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan	Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024

Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024

Terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan tersebut kemudian dilakukan penelaahan terkait permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Perhubungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KL	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya konektivitas nasional	1. Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi masal perkotaan berbasis jalan dan rel serta integrasi antar moda angkutan 2. Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	1. Keterbatasan alokasi anggran 2. Kurang optimal nya keterjangkauan wilayah yang dapat di akses oleh sarana transpoetasi masal yang tersedia 3. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih rendah dan terbatas	1. Masyarakat sangat antusias dengan adanya angkutan masal BRT 2. Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan umum
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	1. Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah	1. Masyarakat masih terbiasa menggunakan sarana trasnportasi pribadi	1. Pemerintah menyediakan angkutan umum yang aman dan nyaman serta terintegrasi.
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	1. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan 2. Masih tingginya overloading angkutan barang;	1. Alokasi dana masih terbatas 2. Masih tingginya tingkat fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.	1. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalulintas 2. Penegakan Hukum untuk menuju Zoro Odol Tahun 2023

Sumber: Hasil analisis, 2021.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana sistem jaringan transportasi terdiri dari : (a) jaringan jalan; (b) jaringan prasarana lalu lintas; (b) jaringan pelayanan lalu lintas; dan (d) jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;serta (e) jaringan kereta api. Untuk mendukung perkembangan wilayah Kalimantan Selatan perlu usaha peningkatan prasarana dan sarana transportasi. Jaringan jalan sebagai bagian utama dalam sistem transportasi perlu dikembangkan untuk mendukung potensi wilayah di Kalimantan Selatan ang merupakan salah satu simpul strategis. Rencana jaringan jalan di Kalimantan Selatan meliputi penentuan fungsi jaringan jalan, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan.

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah yaitu dengan menghubungkan semua simpul atau pusat-pusat pelayanan secara langsung/menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal hingga pusat kegiatan lingkungan.

Rencana Sistem Jaringan Kereta Api Rencana pengembangan jaringan rel kereta api di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Rencana pembangunan jalan kereta api yaitu jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL yaitu ruas : Tanjung - Barabai - Rantau - Martapura - Banjarmasin.
- b. Rencana angkutan barang sentra-sentra produksi untuk komoditas sumberdaya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah barat Pegunungan Meratus yaitu ruas Batas

Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Tabalong - Kabupaten Hulu Sungai Utara - Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Selatan - Kabupaten Tapin - Kabupaten Banjar - Kabupaten Tanah Laut.

- c. Rencana pengembangan kereta api Banjarmasin-Bandara Syamsudin Noor- Martapura

Tabel 3.5

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Kebijakan RTRW	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Rencana Pengembangan system Prasarana Transportasi Jalan • BRT Banjarbakula	Tugas Pokok: membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah	Belum tersedianya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di kawasan Banjarbakula	Penghambat: Belum tersedianya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di kawasan Banjarbakula Pendorong: Terdapat jaringan trayek yang melayani angkutan umum antar kota dalam provinsi
2.	Rencana Pengembangan system Prasarana Transportasi Jalan • Terminal Tipe B	Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran; 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan,	Belum Optimalnya terminal penumpang Tipe B di Kabupaten Tabalong	Penghambat: Terminal tipe B yang ada saat ini yang merupakan pelimpahan p3d daerah yang kondisinya tidak sesuai dengan standar terminal tipe B Pendorong: Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan

No	Kebijakan RTRW	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor Penghambat dan Pendorong
		Angkatan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;		pelayanan kepada masyarakat
3.	Rencana pengembangan system Prasarana Tranportasi SDP Transportasi Sungai Danau	3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran; 4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya	Belum optimalnya pengembangan dan/atau pengelolaan Pelabuhan sungai dan danau	Penghambat: Pergeseran penurunan penggunaan moda angkutan sungai. Pendorong: Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.
4.	Rencana pembangunan jalan kereta api		Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Selatan	Penghambat: Tingginya nilai investasi yang mengakibatkan kebijakan pemerintah pusat dan swasta belum mampu untuk merealisasikan rencana pembangunan perkeretapian di Kalimantan. Pendorong: Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang IKN baru

Sumber: Hasil analisis, 2021.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Berdasarkan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disusun bersamaan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, maka dirumuskan isu strategis KLHS dan beberapa rekomendasi berupa antisipasi/mitigasi/adaptasi yang terkait urusan Perhubungan seperti pada Tabel sebagai berikut

Tabel 3.6

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Ekonomi dan Lingkungan Terkait Urusan Perhubungan

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keuangan Daerah	Wilayah Prioritas
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	a. Belum Tercapainya pengembangan Transportasi, yang berkualitas, handal, tangguh dan berkelanjutan	11.2.1(a)	B		
	b. Transportasi Umum yang belum berjalan dengan baik di perkotaan	11.2.1(a) 11.2.1(b)	B		Kota Banjarmasin, Banjarbaru

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keuangan Daerah	Wilayah Prioritas
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Belum Mantapnya fasilitas Penyebrangan	9.1.2 (b)	B		

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Tabel 3.7**Isu Strategis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026**

No.	Isu Strategis Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan	Isu TPB	Lokasi	Rekomendasi Program Sesuai Kepmen 050	SKPD
1	TPB Pilar Lingkungan Tujuan 11 Menjadikan Kota dan pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Belum Tercapainya pengembangan Transportasi, yang berkualitas, handal, tangguh dan berkelanjutan	13 Kab/Kota	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan ANgkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Jumlah angkutan umum yang terbatas serta Rendahnya kemampuan integrasi antarmoda dan menghambat konektivitas dan mobilitas antarpusat kegiatan	Transportasi Umum yang belum berjalan dengan baik di perkotaan	13 Kab/Kota	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan ANgkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
2	TPB Pilar Ekonomi Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Belum tersedianya pelabuhan laut internasional belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau. Kurang Optimalnya ketersediaan prasarana transportasi laut & ASDP	Belum Mantapnya fasilitas Penyebrangan		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi dan program Kepala Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
2. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis
3. Sistem dan jaringan transportasi intermoda/multimoda belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan tidak efesiennya dan efektifnya mobilitas penduduk;
4. Sarana dan prasarana transportasi yang belum sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan transportasi;
5. Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe B dan terminal angkutan barang
6. Belum optimalnya pelayanan dermaga penyeberangan
7. Belum tersedianya pelabuhan pengumpan regional dan dalam mendukung distribusi angkutan orang dan barang di Kalimantan Selatan
8. Belum adanya transportasi berbasis rel,
9. Kurangnya SDM berlatar belakang teknis perhubungan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat 49, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Tujuan pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang selaras dengan Bidang Perhubungan yaitu pada misi 3 Memperkuat Sarana dan Prasarana Dasar. Adapun Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, 1 (Satu) Tujuan, yaitu: **“Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan dengan penyediaan infratraktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan”**

4.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran pada RPIMD Tahun 2021-2026 yang selaras dengan Bidang Perhubungan dan menjadi tugas Dinas Perhubungan

Provinsi Kalimantan Selatan yaitu meningkatkan konektivitas yang menghubungkan antar kawasan

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 4 (Empat) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Konektivitaas Provinsi dengan indikator rasio konektivitas pada tahun 2026 sebesar 0.67
2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan dengan indikator On time performance layanan transportasi sebesar 61.5
3. Meningkatkan Keselamatan Transportasi dengan rasio kejadian kecelakaan pada tahun 2026 sebesar 0 (zero)
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi pada tahun 2026 sebesar 82.2

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi awal 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Memantapkan sistem transportasi yang berorientai pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Kalimantan Selatan	1. Terwujudnya Konektivitas transportasi darat dan Perairan	Rasio Konektivitas	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.67
		2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	On time performance layanan transportasi	34	58.5	58.5	59.0	60.0	61.5	61.5
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	77.5	81.3	81.5	81.7	82.0	82.2	82.2
		3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian kecelakaan transportasi per 100.000 keberangkatan	2.73	2.65	2.6	1.6	0.75	0	0

BAB V

SRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan adalah dengan:

1. Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Sustainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata
2. Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang

didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi Konektifitas, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perhubungan, disajikan pada tabel berikut

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi:	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi 3:	Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Kalimantan Selatan	Terwujudnya Konektivitas transportasi darat dan Perairan	Rasio Konektivitas	Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Sustainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata	1. Penyusunan kajian sebagai dasar pengembangan transportasi di Kalsel 2. Membangun sistem angkutan umum massal berbasis jalan melalui pembangunan BRT di kawasan Banjarbakula 3. Pembangunan sarana perpindahan moda transportasi yang berintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau. 4. Pengembangan prasarana, sarana dan penunjang operasional angkutan perairan 5. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan instansi terkait guna mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana

Visi:	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi 3:	Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
				perkeretaapian di Kalimantan Selatan
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Ontime Performance Layanan Transportasi	Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	1. Peningkatan pelayanan angkutan umum darat dan perairan yang inklusif dan memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah koridor angkutan aglomerasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta	1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau. 2.

Visi:	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi 3:	Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
			menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	
	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100.000 keberangkatan	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Membangun sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan. 2. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada ruas-ruas jalan provinsi. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan melalui peremajaan, penambahan dan penataan trayek. 5. Menyelenggarakan operasional terminal type B. 6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan 7. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Sumber: Hasil analisis, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Indikasi rencana program prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif Rencana program Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 3 (Tiga) program sebagai berikut:

1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
2. Program pengelolaan pelayaran
3. Program pengelolaan perkeretaapian

Rencana Pendanaan untuk program tersebut dari APBD untuk meningkatkan kinerja dan kebutuhan anggaran untuk pencapaian outcome dari program tersebut selama 5 tahun yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program dan Indikator Target Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pada Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100%	19,050	100%	19,050	100%	19,050	100%	19,050	100%	19,050	100%	95,250	DINAS PERHUBUNGAN	
		2 15 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2.15 01 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD		4 dokumen	350	4 dokumen	350	4 dokumen	350	4 dokumen	350	4 dokumen	350		1,750		
		2.15 01 1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD		1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50		250		
		2.15 01 1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA SKPD		1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50		250		
		2.15 01 1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD		1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50		250		
		2.15 01 1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD		1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50		250		
		2.15 01 1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD		1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100		500		
		2.15 01 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah selama satu tahun		4 dokumen	300	4 dokumen	300	4 dokumen	300	4 dokumen	300	4 dokumen	300		1,500		
		2 15 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2.15 01 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji		83 orang	10,500	83 orang	10,500	83 orang	10,500	83 orang	10,500	83 orang	10,500		52,500		
		2.15 01 1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga keuangan yang di berikan honor selama satu tahun		22 orang	250	22 orang	250	22 orang	250	22 orang	250	22 orang	250		1,250		
		2.15 01 1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen keuangan akhir tahun		1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50		250		
		2 15 01 1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Pesentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2.15 01 1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan		83 stel	100	83 stel	100	83 stel	100	83 stel	100	83 stel	100		500		
		2.15 01 1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pegawai selama satu tahun		10 orang	100	10 orang	100	10 orang	100	10 orang	100	10 orang	100		500		
		2.15 01 1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan selama satu tahun		13 orang	100	13 orang	100	13 orang	100	13 orang	100	13 orang	100		500		
		2 15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum perangkat daerah yang di laksanakan		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2.15 01 1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah komponen instalasi listrik bangunan kantor selama satu tahun		2 buah	50	2 buah	50	2 buah	50	2 buah	50	2 buah	50		250		
		2.15 01 1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor selama satu tahun		12 bulan	50	12 bulan	50	12 bulan	50	12 bulan	50	12 bulan	50		250		
		2.15 01 1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kendaraan yang diisi BBM selama satu tahun		12 bulan	2,500	12 bulan	2,500	12 bulan	2,500	12 bulan	2,500	12 bulan	2,500		12,500		
		2.15 01 1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetak dan pengadaan selama 1 tahun		12 bulan	100	12 bulan	100	12 bulan	100	12 bulan	100	12 bulan	100		500		
		2.15 01 1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan selama satu tahun		12 bulan	50	12 bulan	50	12 bulan	50	12 bulan	50	12 bulan	50		250		
		2.15 01 1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi selama satu tahun		88 orang	700	88 orang	700	88 orang	700	88 orang	700	88 orang	700		3,500		
		2.15 01 1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.Jumlah pameran pembangunan yang diikuti 2. 'Jumlah website yang di operasikan		12 bulan	150	12 bulan	150	12 bulan	150	12 bulan	150	12 bulan	150		750		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Pada Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%		100%		100%		100%		100%		100%					
		2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bangunan kantor yang terbayarkan sumber daya air dan listrik		2 Buah	350	2 Buah	350	2 Buah	350	2 Buah	350	2 Buah	350		1,750				
		2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bangunan kantor yang dibersihkan jumlah makanan minuman pegawai selama satu tahun jumlah makanan minuman rapat		2 Buah 83 orang 83 orang	650	2 Buah 83 orang 83 orang	650	2 Buah 83 orang 83 orang	650	2 Buah 83 orang 83 orang	650	2 Buah 83 orang 83 orang	650		3,250				
		2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
		2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang di pelihara jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayarkan		34 buah	900	34 buah	900	34 buah	900	34 buah	900	34 buah	900		4,500				
		2.15.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang di pelihara		2 buah	1,500	2 buah	1,500	2 buah	1,500	2 buah	1,500	2 buah	1,500		7,500				
Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan dengan penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	1. Terwujudnya Konektivitas Provinsi 2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan 3. Meningkatkan keselamatan Transportasi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	• Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa • Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang • Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Pengguna Jalan di Kalsel			11,424	20%	24,950	30%	24,885	50%	27,700	60%	23,720	60%	112,679	DINAS PERHUBUNGAN			
								67.5%		70%		75%		77.5%		77.5%					
									2.65%		2.6%		2.25%		2.00%		2.00%				
		2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen rencana induk jaringan jalan yang diterbitkan	0		0	1 Dokumen	700		0		0		0	1 dokumen	700	DINAS PERHUBUNGAN			
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Presentase Ketersediaan Perengkapan Jalan Di Jalan Provinsi	17%	18.50%		20%		22%		25%		27%		27%					
		2.15.02.1.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah pembangunan prasarana jalan		100 meter	3,649	300 meter	10,000	300 meter	11,000	300 meter	10,000	300 meter	8,000	1300 meter	42,649				
		2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	jumlah fasilitas perengkapan jalan di jalan provinsi Guadril jumlah fasilitas perengkapan jalan di jalan provinsi marka jumlah fasilitas perengkapan jalan di jalan provinsi PJU jumlah fasilitas perengkapan jalan di jalan provinsi rambu lalin jumlah fasilitas perengkapan jalan di jalan provinsi warning light jumlah fasilitas perengkapan jalan di jalan provinsi RPPJ jumlah fasilitas perengkapan jalan di jalan provinsi ATCS jumlah fasilitas perengkapan jalan di jalan provinsi ZO55		4600 Meter 61 buah 270 buah 2 buah - 1 Titik		7000 Meter 90 buah 300 buah 5 buah 10 buah 1 simpang 1 Titik		7000 Meter 100 buah 300 buah 5 buah 10 buah 1 simpang 1 Titik		7000 Meter 100 buah 300 buah 5 buah 10 buah 1 simpang 1 Titik		7000 Meter 100 buah 300 buah 5 buah 10 buah 1 simpang 1 Titik		32.600 meter 461 buah 1470 buah 22 buah 40 buah 4 simpang 5 titik					
		2.15.02.1.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah rehabilitasi prasarana jalan		59 buah	350	70 buah	600	70 buah	600	70 buah	600	70 buah	600	87 buah	2,750				
		2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	JUMLAH FASILITAS KESELAMATAN YANG DIPELIHARA																	
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase Sarana dan Prasarana Terminal tipe B yang memenuhi Standar		8.81		23.86		20.88		25.58		20.88		100					
		2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah dokumen rencana induk terminal yang diterbitkan				5 Terminal	500							5 terminal	500				
		2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang dibangun				1 Terminal	2,000	1 Terminal	1,500	2 Terminal	3,000	1 Terminal	1,500	5 terminal	8,000				
		2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana terminal yang dikembangkan		5 Terminal	1,049	5 Terminal	3,000	5 Terminal	3,000	5 Terminal	3,000	5 Terminal	3,000	5 terminal	13,049				
		2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang direhabilitasi dan dipelihara		1 Terminal	1,732	1 Terminal	2,000	1 Terminal	2,000	1 Terminal	2,000	1 Terminal	2,000	5 terminal	9,732				
		2.15.02.1.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah SDM Pengelola Terminal yang kompeten		5 orang	24	10 orang	100	15 orang	150	15 orang	150	15 orang	150	60 Orang	574				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pada Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase ruas jalan provinsi yang di lakukan manajemen dan rekayasa		20%		25%		30%		35%		40%		40%		DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		7 kali	70	5 kali	100	5 kali	100	6 kali	150	6 kali	150	29 kali	570		
		2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah kegiatan uji coba atau sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas jalan		0	0	7 Ruas	300	5 Ruas	300	8 Ruas	400	8 Ruas	450	28 Ruas	1,450		
		2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		13 Kab/Kota	100	13 Kab/Kota	100	13 Kab/Kota	100	13 Kab/Kota	100	13 Kab/Kota	100	13 Kab/Kota	500		
		2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	JUMLAH RUAS JALAN PROVINSI YANG DIAWASI DAN DIKENDALIKAN EFEKTIFITAS PELAKSAAAN KEBIJAKANNYA UNTUK JALAN PROVINSI		25 Ruas	1,000	25 Ruas	1,500	25 Ruas	1,500	25 Ruas	1,500	25 Ruas	1,500	25 ruas	7,000		
		2.15.02.1.05.05	Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi yang terlaksana		10 Ruas	100	12 Ruas	150	12 Ruas	170	10 Ruas	150	10 Ruas	170	54 Ruas	740		
		2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Dokumen Andalalin yang diterbitkan		20%		20%		20%		20%		20%		100%		DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.06.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin																
		2.15.02.1.06.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah penilai andalalin yang dibina															
		2.15.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI ANDALALIN YANG DITERBITKAN		6 dokumen	50	8 dokumen	100	10 dokumen	140	10 dokumen	150	10 dokumen	150	44 dokumen	590		
		2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah pelaksanaan rekoendasi andalalin yang di awasi		6 dokumen	50	8 Dokumen	75	8 Dokumen	75	10 Dokumen	100	10 Dokumen	100	42 dokumen	400		
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan llaj di jalan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.07.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	JUMLAH AUDITOR DAN INSPEKTOR LLAJ YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA															
		2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1. JUMLAH PENINGKATAN KOMPETENSI PENGEMUDI UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN 2. JUMLAH ANGKUTAN UMUM YANG DIINSPEKSI, AUDIT DAN DIPANTAU		13 kab/ kota	150	13 kab/ kota	200	13 kab/ kota	200	13 kab/ kota	200	13 kab/ kota	200	13 kab/ kota	950		
		2.15.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah terminal yang di audit di awasi dan di pantau		5 terminal		5 terminal		5 terminal		5 terminal		5 terminal		5 terminal			
		2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1. JUMLAH UPPKB YANG DIINSPEKSI, AUDIT DAN DIPANTAU 2. Jumlah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi pengemudi untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan		39 orang 13 kab/kota	150 13 kab/kota	39 orang 13 kab/kota	150	39 orang 13 kab/kota	150	39 orang 13 kab/kota	150	39 orang 13 kab/kota	150	195 orang 13 kab/kota	750		
		2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah perusahaan angkutan umum yang diaudit dan di pantau															
		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang tersedia		0.11%		46.46%		53.54%		64.65%		78.79%		79%		DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah angkutan BRT yang beroperasi		11 buah	2,000		2,300		3,000		5,000		5,000	99 buah	17,300		
		2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	JUMLAH KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI YANG DIAWASI		420 buah	50	420 buah	75	420 buah	100	420 buah	100	420 buah	100	420 buah	425		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Pada Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan angkutan perkotaan di kalimantan selatan				100%								100%			
		2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	jumlah perumusan dan kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				1 dokumen	100							1 dokumen	100		
		2.15.02.1.09.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	jumlah sosialisasi kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				1 kali	150							1 kali	150		
		2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase pentapan jaringan trayek di provinsi kalimantan selatan		20%		40%				80%				100%		DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	250					1 dokumen	350			2 doukumen	600		
		2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provsins				3 kali	100			3 kali	200			6 kali	300		
		2.15.02.1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan				100%								100%			
		2.15.02.1.11.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 dokumen	150							1 dokumen	150		
		2.15.02.1.11.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	jumlah sosialisasi dan uji coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				3 kali	100							3 kali	100		
		2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Melayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan		30%				60%								DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.12.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	jumlah Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 dokumen	150			1 dokumen	150					2dokumen	300		
		2.15.02.1.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	jumlah sosialisai dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi		3 kali	100			3 kali	100					6 kali	200		
		2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dalam provinsi														DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah rekomendasi ijin angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi yang di awasi															
		2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	jumlah ijin angkutan dalam trayek di kalsel yang dilakukan monitoring dan evaluasi		4 buah	150	4 buah	150	4 buah	150	4 buah	150	4 buah	150	4 buah	750		
		2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase izin usaha angkutan taksi dalam provinsi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah rekomendasi ijin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi															
		2.15.02.1.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Oeerasinya Kewenangan Provinsi	jumlah rekomendasi ijinPengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi yang diawasi		4 buah	150	4 buah	150	4 buah	150	4 buah	150	4 buah	150	4 buah	750		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target												Unit Kerja Pada Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pesentase penetapan tarif angkutan dalam daerah provinsi kalimantan selatan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.15.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	jumlah analisis Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1 dokumen	150					1 dokumen	150		
		2.15.02.1.15.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	jumlah data dan informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi		1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50			250	
		2.15.02.1.15.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengendalian dn pengawasan tarif kelas ekonomi Angkutan Orang dan AngkutanPerkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi		3 kali	50	3 kali	50	3 kali	50	3 kali	50	3 kali	50			250	
Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan dengan penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	1. Terwujudnya Konektivitas Provinsi 2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan 3. Meningkatkan keselamatan Transportasi	2.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Antar Kota dan Kabupaten dalam Provinsi yang Beroperasi		40%	4350	40%	4975	40%	5356	60%	5752	60%	1964	60%	22397	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Persentase perbitan izin usaha angkutan laut dalam daerah provinsi kalimantan selatan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.1.02.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Rekomendasi Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 buah	10 buah	100	10 buah	120	10 buah	140	10 buah	168	10 buah	202	10 buah	730		
		2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2.15.03.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	jumlah data jaringan lintas penyeberangan antar kab/kota dalam provinsi yang beroperasi	5 buah	5 buah	150	5 buah	175	5 buah	200	5 buah	225	5 buah	250	5 buah	1,000	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	PERSENTASE BADAN USAHA JASA TERKAIT ANGKUTAN PERAIRAN YANG DILAYANI		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2.15.03.1.06.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah rekomendasi Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 buah	20 buah	150	20 buah	180	20 buah	216	20 buah	259	20 buah	312	20 buah	1,117	DINAS PERHUBUNGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Pada Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar		20.50%		23.07%		23.07%		25.64%		25.64%		25.64%		DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.1.10.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan danau yang memenuhi standar	4 buah	4 buah	100	4 buah	100	5 buah	125	5 buah	150	6 buah	175	6 buah	650		
		2.15.03.1.10.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar	7 buah	8 buah	3,500	9 buah	4,000	9 buah	4,250	9 buah	4,500	10 buah	550	10 buah	16,800		
		2.15.03.1.10.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah pengoperasian pelabuhan sungai danau yang terawasi		13 buah	350	15 buah	400	15 buah	425	15 buah	450	16 buah	475	16 buah	2,100		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan kondisi awal Tahun 2020 dan target kinerja selama 5 tahun mendatang yang sesuai RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas PerhubunganProv.
Kalsel Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Rasio Konektivitas Provinsi	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.67
2	Ontime Performance Layanan Transportasi	34	58.5	58.5	59.0	60.0	61.5	61.5
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	77.5	81.3	81.5	81.7	82.0	82.2	82.2
4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100.000 keberangkatan	2.73	2.65	2.6	1.6	0.75	0	0

Sumber: Hasil proyeksi, 2021

Selain indikator Kinerja Utama yang telah dimuat pada tabel di atas, terdapat beberapa indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD pada kewenangan urusan Perhubungan. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan yang dilengkapi target mulai tahun 2022 sampai dengan 2026.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	Indikator Kinerja:								
1	Rasio Konektivitas	poin	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.67
2	Ontime Performance Layanan Transportasi	%	34	58.5	58.5	59.0	60.0	61.5	61.5
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Poin	77.5	81.3	81.5	81.7	82.0	82.2	82.2
4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100.000 keberangkatan	poin	2.73	2.65	2.6	1.6	0.75	0	0
II	Indikator Program:								
1	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	%	17,9	20	30	40	50	60	60
2	Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang	%	65	67,5	70	72,5	75	77,5	77,5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Presentase penurunan kecelakaan pengguna jalan di Kalsel	%	3.00	2.65	2.60	2.5	2.25	2.00	2.00
4	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Antar Kota dan Kabupaten dalam Provinsi yang Beroperasi	%	40	40	60	60	60	60	60
5	Presentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	%	0	0	0	100	100	100	100
III	Indikator Kegiatan:								
1	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	%	19.5	20	30	40	50	60	60
2	Presentase Terangkutnya Penumpang dan Barang	%	65	67.5	70	72.5	75	77.5	77.5
3	Presentase Pengguna Jalan Yang Melanggar Lalulintas	%	2.75	2.65	2.60	2.50	2.25	2.00	2.00
4	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Antar Kota dan Kabupaten dalam Provinsi yang Beroperasi	%	40	40	40	40	60	60	60
5	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	%	0	0	0	100	100	100	100
IV	Indikator Kegiatan:								
1	Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan		17.5	18.5	20	22	25	27	27

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi								
2	Presentase Sarana dan Prasarana Terminal tipe B yang memenuhi Standar	%	20	20	20	60	60	100	100
3	Presentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa	%	20	25	30	35	40	40	40
4	Presentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan	%	20	20	20	20	20	20	100
5	Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia	%	0.11	46.46	53.54	64.65	78.79	79	79
7	Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Dalam Provinsi	%	20	20	20	20	20	100	100
8	Presentase Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi								
9	Persentase data Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan antar Kota/Kab dalam Provinsi yang beroperasi	%	40	40	40	60	60	60	60
10	Persentase Badan Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar	%	20.50	23.07	23.07	25.64	25.64	25.64	25.64

Sumber: Hasil Analisis 2021

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Bidang/UPTD dan sekretariat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang dapat dijadikan pedoman bagi melaksanakan urusan bidang perhubungan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Bidang/UPTD dan sekretariat di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Renstra Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat.
- 2) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan bidang perhubungan pada pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan kemampuan pendanaan daerah.
- 3) Bidang/UPTD dan Sekretariat dapat melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
- 4) Untuk penyusunan Renja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 , ydng selanjutnya

menjadi dasar penyusunan Rencana anggaran program kegiatan yang akan diusulkan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya Ranstra tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pogram dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Dinas Perhubungan Provinsii Kalimantan Selatan akan melaksanakan penyusunan Renja Tahun 2021-2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas, dan untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi.